

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Pengarusutamaan gender atau *gender mainstreaming* merupakan upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Melalui strategi ini diharapkan semua perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya pembangunan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pengarusutamaan Gender didefinisikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Definisi tersebut menegaskan bahwa PUG bukan merupakan program yang berdiri sendiri, melainkan suatu strategi yang harus melekat pada seluruh siklus kebijakan dan program pembangunan di setiap kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah (Kementerian PPPA, 2014).

Komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender tersebut diwujudkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menginstruksikan kepada seluruh Kementerian, lembaga pemerintah, serta pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang kemudian diperbaharui

melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No.15 Tahun 2008 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah. (Indonesia, 2000)

Pada dasarnya Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup manusia dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan politik. Dalam perspektif pembangunan modern, masyarakat dipandang sebagai subjek pembangunan yang memiliki peran penting dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah mencakup keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Dalam konteks ini, partisipasi perempuan dan laki-laki menjadi sangat penting karena keduanya memiliki pengalaman, kebutuhan, serta peran sosial yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Apabila pembangunan tidak mempertimbangkan perbedaan tersebut, maka kebijakan dan program pembangunan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan.

Partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan juga dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, Pasal 28D ayat (3) juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Meskipun berbagai kebijakan dan regulasi terkait kesetaraan gender telah ditetapkan, dalam praktiknya partisipasi

perempuan dalam pembangunan masih menghadapi berbagai kendala. (Indonesia, 1945)

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pembangunan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam sektor pengambilan keputusan yang kurang melibatkan perempuan. Representasi perempuan dalam jabatan strategis pemerintah dan lembaga legislatif belum mencapai 30% sebagaimana didorong dalam kebijakan afirmatif politik. Selain itu, kesenjangan gender juga terlihat dalam bidang ekonomi dan dunia kerja. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat sekitar 54 %, sedangkan laki-laki mencapai sekitar 84%. (BPS, 2023)

Sebagai pusat pemerintahan dan daerah dengan kapasitas fiskal terbesar di Indonesia, Jakarta memiliki perangkat kelembagaan yang relatif lengkap, termasuk dinas khusus pemberdayaan perempuan, data terpilah gender, serta mekanisme penganggaran yang lebih maju. Secara teoritis, dengan sumber daya dan kapasitas kelembagaan tersebut, implementasi PUG seharusnya berjalan optimal. Namun kenyataannya, dominasi laki-laki dalam jabatan struktural dan posisi pengambilan keputusan masih terlihat, termasuk pada tingkat pemerintahan lokal.

Data menunjukkan bahwa pada periode 2019-2024 jumlah anggota perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta hanya 23 orang dari total 106 anggota atau sekitar 21,7%, sedangkan laki-laki mencapai sekitar 78,3%. Angka ini masih berada di bawah target afirmatif keterwakilan perempuan sebesar 30% yang diharapkan dalam lembaga legislatif.

Ketimpangan tersebut juga tercermin di sektor non-pemerintah, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2023, Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berada di kisaran 54,5%, sementara laki-laki mencapai sekitar 83,9%. Artinya, terdapat selisih hampir 30% yang menunjukkan bahwa perempuan masih jauh lebih sedikit terlibat dalam aktivitas ekonomi

dibandingkan laki-laki sekitar 55%. Sektor informal ini umumnya memiliki karakteristik pendapatan yang tidak stabil, minim perlindungan sosial, serta terbatas dalam akses terhadap pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan terlibat dalam aktivitas ekonomi, posisi mereka masih cenderung rentan dan kurang strategis.

Di sektor usaha, perempuan memang memiliki kontribusi cukup besar dalam UMKM. Data kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sekitar 64% pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, namun mayoritas berada pada skala mikro dengan keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan jaringan pasar. Akibatnya, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan bisnis strategi masih relatif rendah dibandingkan laki-laki.

Jika dilihat dari indikator pembangunan gender, kondisi DKI Jakarta sebenarnya menunjukkan capaian yang relatif baik dibandingkan daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Tetapi meskipun nilai indeks ini relatif tinggi di DKI Jakarta, ketimpangan partisipasi dalam struktur pengambilan keputusan masih tetap ditemukan.

Kondisi empiris di wilayah Kepulauan Seribu yang menunjukkan keterbatasan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Bukan hanya dalam instansi pemerintahan, di berbagai instansi maupun forum di luar lingkup pemerintahan di Kabupaten Administratif Pulau Seribu sangat minim keterlibatan perempuan.

Oleh karena itu, penerapan kebijakan pengarusutamaan gender menjadi penting untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah. Kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar penting untuk melakukan penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan melalui pendekatan pengarusutamaan gender di wilayah Kepulauan Seribu. (BPS, tahun 2026)

1.2 Permasalahan Penelitian

Di wilayah perkotaan seperti Jakarta Pusat, perempuan memiliki akses yang relatif lebih besar terhadap pendidikan, pekerjaan, dan organisasi sosial. Hal ini membuat perempuan lebih aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan masyarakat seperti organisasi masyarakat masih relatif terbatas dibandingkan laki-laki. Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, tingginya aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah tersebut mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan masyarakat, namun keterlibatan perempuan dalam jabatan struktural pemerintahan atau posisi strategis organisasi masyarakat masih relatif terbatas dibandingkan laki-laki. Sampai Pada wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu yang merupakan satu satunya wilayah kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki wilayah kepulauan. Kondisi geografis yang terpisah dari daratan utama Jakarta serta jumlah penduduk yang relatif kecil menyebabkan dinamika pembangunan dan partisipasi masyarakat di wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah kota lainnya di DKI Jakarta, dan dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berada pada peringkat terakhir.

Table 1.1 IPG Daerah Khusus Jakarta Berdasarkan Kota/Kabupaten

No	Kabupaten/Kota Administratif	IPG
1	Jakarta Selatan	98,43
2	Jakarta Pusat	97,60
3	Jakarta Barat	96,58
4	Jakarta Timur	96,54
5	Jakarta Utara	95,04
6	Kepulauan Seribu	94,48

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2026

Nilai IPG pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan di Kabupaten Administrasi Pulau Seribu masih tergolong lebih rendah jika dibandingkan laki-laki. dengan demikian, dibandingkan wilayah lain di DKI

Jakarta, Kepulauan Seribu merupakan wilayah dengan tingkat kesenjangan gender yang relatif lebih besar.

Dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kepulauan, perempuan sebenarnya memiliki peran yang cukup penting, terutama dalam mendukung perekonomian keluarga. Banyak perempuan yang terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi lokal seperti pengelolaan homestay, usaha kuliner, penjualan cenderamata, serta kegiatan yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menopang perekonomian rumah tangga dan pembangunan ekonomi lokal di wilayah kepulauan. Namun demikian, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di tingkat masyarakat masih menunjukkan adanya ketimpangan dibandingkan laki-laki. Dalam berbagai forum musyawarah masyarakat, seperti pertemuan RT/RW, musyawarah kelurahan, maupun forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), laki-laki masih lebih dominan sebagai tokoh masyarakat, pemimpin forum, maupun pihak yang menentukan keputusan akhir. Sementara itu, perempuan seringkali hadir sebagai peserta atau perwakilan kelompok masyarakat seperti PKK atau kader kesehatan, tetapi belum memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di tingkat lokal.

Keterbatasan akses geografis dan infrastruktur di wilayah kepulauan juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Akses informasi mengenai program pemerintah, pelatihan kepemimpinan, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak selalu merata di seluruh wilayah kepulauan. Akibatnya, kesempatan perempuan untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan menjadi lebih terbatas dibandingkan laki-laki yang umumnya posisi lebih kuat dalam struktur sosial masyarakat (KemenPPPA, 2022).

Demografi terbaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kepulauan Seribu mencapai sekitar 30.414 jiwa pada 2024, dengan mayoritas penduduk berada dalam kelompok usia produktif (15-59 tahun). Sekitar 27 % penduduk masih tergolong anak-anak (0-14 tahun), sedangkan penduduk lanjut usia (60

tahun ke atas) sekitar 68% dari total populasi. Distribusi jenis kelamin di Kepulauan Seribu juga menunjukkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Data BPS tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 14.596 jiwa dan perempuan sekitar 14.329 jiwa, yang berarti proporsi perempuan hampir menyamai laki-laki.

Kondisi ini menjadi penting dalam konteks pengarusutamaan gender, mengingat semakin seimbangnya komposisi gender penduduk seharusnya diikuti dengan kesempatan yang setara dalam peran sosial dan pembangunan. Namun demikian, data pendidikan di Kepulauan Seribu menunjukkan adanya kekurangan dalam proporsi pendidikan tinggi (S1 ke atas) pada akhir 2024. Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut, yang tentunya berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai proses pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan forum perencanaan pembangunan.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional. Instruksi ini menegaskan bahwa seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah wajib mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan dan program. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan cara mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai faktor kehidupan.

Dengan demikian, Pengarusutamaan Gender menjadi strategi penting dalam memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam proses pembangunan. Pemerintah Kabupaten Administratif Pulau Seribu melalui berbagai strategi yang meliputi penguatan kelembagaan gender, pelibatan perempuan dalam forum perencanaan pembangunan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penguatan penguatan kelembagaan gender, dengan membentuk Pokja PUG sebagai koordinator integrasi perspektif gender di seluruh perangkat daerah dan menempatkan *focal*

point gender di setiap dinas dan lembaga. Strategi ini bertujuan agar setiap program pembangunan daerah, dari perencanaan hingga evaluasi, memperhatikan kesetaraan gender. Meskipun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi antar level, khususnya dari kelurahan dan RT/RW hingga kecamatan, masih lemah sehingga PUG belum sepenuhnya tersentuh di masyarakat pulau kecil.

Pemerintah daerah berupaya melibatkan perempuan dalam forum perencanaan pembangunan, seperti musrenbang kelurahan dan kecamatan, untuk memberikan ruang bagi perempuan menyampaikan aspirasi terkait pembangunan daerah. Tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan memastikan kebutuhan serta kepentingan perempuan tercermin dalam dokumen perencanaan pembangunan. Faktanya, perempuan sering hadir sebagai peserta atau perwakilan kelompok masyarakat seperti PKK atau kader kesehatan, dan usulan yang mereka sampaikan cenderung tidak menjadi prioritas, sehingga partisipasi substantif perempuan masih rendah.

Penguatan kapasitas aparatur pemerintah, termasuk pelatihan analisis gender, penyusunan anggaran responsif gender, dan bimbingan teknis terkait perencanaan berbasis gender. Strategi ini dimaksudkan agar aparatur pemerintah mampu merancang program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Namun, pelatihan dan bimbingan ini umumnya diberikan di tingkat dinas atau kecamatan, sementara aparatur di tingkat RT/RW atau pengelola komunitas lokal jarang tersentuh, sehingga implementasi di tingkat paling bawah masih minim.

Pemerintah juga mengembangkan program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM, homestay, pelatihan pariwisata, dan kampanye literasi gender melalui komunitas maupun sekolah. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi perempuan sekaligus membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender. Namun, program-program ini cenderung fokus pada aspek ekonomi dan sosialisasi tanpa mampu mengubah struktur sosial yang membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, pemerintah juga

melakukan sosialisasi dan kampanye kesetaraan gender, melalui kegiatan masyarakat, seminar, dan program pendidikan. (mansour, 2013)

Tujuan dari kampanye ini adalah untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam pembangunan dan meningkatkan kesadaran hak-hak perempuan. Meski demikian, efektivitas kampanye masih terbatas karena nilai-nilai patriarki masih kuat, sementara akses informasi di pulau-pulau kecil seperti Pulau tidung tidak merata. Pemerintah daerah juga berupaya mengintegrasikan perspektif gender dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah, termasuk RPJMD, Renja SKPD, dan dokumen Musrenbang, agar setiap kebijakan pembangunan memperhitungkan kebutuhan perempuan. Tujuan strategi ini adalah agar setiap program pembangunan lebih inklusif dan responsif gender. Pada kenyataannya, indikator gender dalam dokumen sering bersifat formalitas, sehingga implementasinya belum mampu menghasilkan perubahan nyata dalam peningkatan partisipasi perempuan.

Dari perspektif *Gender and Developtmen* (GAD) ketimpangan gender yang masih terjadi menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan yang bersifat struktural. Pendekatan GAD menekankan bahwa ketidaksetaraan gender tidak hanya disebabkan oleh perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga oleh konstruksi sosial dan budaya yang membentuk relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak cukup hanya melalui peningkatan partisipasi perempuan secara kuantitatif, melainkan harus mampu mengubah struktur sosial yang membatasi akses, kontrol, dan manfaat perempuan dalam Pembangunan. (Moser, 1993)

Partisipasi perempuan seringkali dijadikan indikator keberhasilan implementasi PUG. Namun demikian, pendekatan GAD mengkritisi ukuran tersebut karena kehadiran perempuan dalam forum-forum pembangunan belum tentu mencerminkan keterlibatan yang bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perlu dilihat secara lebih substantif, yakni bagaimana perempuan hingga saat ini memiliki kemampuan untuk menyampaikan aspirasi, memengaruhi

proses pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang setara dari kebijakan Pembangunan. (Moser, 1993)

Teori *Ladder of Citizen Participation* yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein, tingkat partisipasi perempuan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masih berada pada tahap tokenism. Pada tingkat ini, masyarakat termasuk perempuan yang telah diberikan ruang untuk berpartisipasi, seperti melalui mekanisme konsultasi dari forum musyawarah, namun keterlibatan tersebut belum disertai dengan kekuasaan yang memadai untuk menentukan keputusan. Dengan kata lain, partisipasi yang terjadi masih bersifat simbolik dan belum mencerminkan distribusi kekuasaan yang setara antara pemerintah dan masyarakat (Arnstein, 1969).

Kondisi tersebut dapat terlihat dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) serta berbagai program pemberdayaan perempuan di Kepulauan Seribu. Meskipun perempuan secara formal dilibatkan dalam proses tersebut, dalam praktiknya mereka masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti rendahnya kapasitas dalam menyampaikan aspirasi, dominasi laki-laki dalam proses diskusi, serta terbatasnya akses terhadap informasi dan sumber daya. Hal ini mengakibatkan aspirasi perempuan seringkali tidak menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Ketidaksesuaian tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor kultural yang masih kuatnya nilai patriarki dalam masyarakat pesisir, faktor kelembagaan yang belum optimal dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, serta faktor kapasitas baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan konsep pengarusutamaan gender. Selain itu, program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah seringkali lebih berfokus pada aspek administratif dan formalitas, sehingga belum mampu mendorong perubahan yang signifikan dalam relasi gender di tingkat lokal.

Dengan demikian, permasalahan utama penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan Pengarusutamaan Gender dengan realita partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kepulauan Seribu. Meskipun berbagai strategi telah

dilakukan, namun partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung stagnan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan Pengarusutamaan gender serta faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Mengapa strategi pemerintah daerah diperlukan dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung dan terwujudnya PUG di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Akademik

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam mendukung dan menghambat terwujudnya Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

1.4.2 Tujuan Praktis

1. Memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah daerah Kepulauan seribu dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang lebih efektif.
2. Bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam memperbaiki kelemahan strategi yang selama ini diterapkan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan kebijakan PUG
3. Menjadi referensi bagi instansi terkait, organisasi masyarakat, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dalam penguatan peran perempuan di tingkat lokal.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, khususnya dalam kajian politik gender, kebijakan publik, dan pembangunan daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa dan peneliti di lingkungan Universitas Kristen Indonesia yang tertarik mengkaji isu kesetaraan gender, partisipasi masyarakat, kebijakan publik, serta pembangunan daerah dari perspektif Ilmu Politik.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap strategi yang telah dijalankan, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan responsif gender, terutama dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat program-program yang mendukung kesetaraan gender di tingkat lokal, mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam pembangunan, serta memperkuat posisi perempuan dan ruang-ruang pengambilan keputusan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan studi ini, penulis berangkat dari beberapa studi terdahulu sebagai landasan:

1. Penelitian berjudul “Analisis Gender dalam Rumah Tangga Nelayan di Kepulauan Seribu” ditulis oleh Addarquthni Faatihah Wafi dan Sarwoprasodjo dan diterbitkan pada tahun 2018 dalam jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (Sarwoprasodjo, 2018). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih kuatnya dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya, serta rendahnya posisi tawar perempuan meskipun mereka berkontribusi dalam ekonomi keluarga.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis relasi gender dalam rumah tangga nelayan serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan teori gender, khususnya konsep pembagian peran gender (*gender division of labor*) dan relasi kekuasaan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial budaya yang patriarki menjadi faktor utama yang menyebabkan perempuan tetap berada pada posisi subordinat.

2. Penelitian berjudul “Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam bidang pendidikan” ditulis oleh Hermina dan diterbitkan pada tahun 2019 dalam jurnal pendidikan dan kebijakan publik (Hermina, 2019). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih adanya kesenjangan akses dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, serta rendahnya pemahaman tenaga pendidik dan peangku kebijakan terhadap konsep Pengarusutamaan Gender. Penelitian ini menggunakan teori gender mainstreaming (PUG) serta teori implementasi kebijakan publik sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan PUG dalam pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya komitmen institusional, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya koordinasi antar stakeholder, dan implementasi PUG dalam pendidikan masih cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh perubahan substantif dalam sistem pendidikan.
3. Penelitian berjudul “Pengarusutamaan Gender dalam Pemerintah Daerah: Studi Naratif tentang Aktor Wanita dalam Partisipasi Wawasan Kebangsaan” ditulis oleh Nabila Listyadharma Putri, Teza Yudha, dan Mochamad Faizal Rizki yang diterbitkan pada tahun 2025 dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan (Putri, Yudha, & Rizki, 2025). Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi bagaimana Pengarusutamaan Gender dalam pemerintah daerah melalui pengalaman partisipan terkait partisipasi aktor wanita dalam program pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi berdasarkan

cerita pengalaman partisipan aktor wanita dalam program pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi berdasarkan teori partisipasi yang dikemukakan Cohn dan Uphoff (1980) yang meliputi empat indikator yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan partisipasi dalam implementasi, manfaat partisipasi dan partisipasi dalam evaluasi. Teori partisipasi ini menjadi landasan untuk menggali pengalaman partisipan terkait partisipasi aktor wanita dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu memberikan ruang kepada aktor wanita untuk memberikan partisipasinya seperti memberikan wewenang aktor wanita untuk ikut serta dalam hal pengambilan keputusan serta memberikan kesempatan kepada aktor wanita untuk berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan program pemerintah.

4. Penelitian berjudul “Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto” ditulis oleh Sri Rahayu Margaretha Jajuk Hanafie, dan diterbitkan pada tahun 2017 dalam jurnal Ilmiah Sosio Agribis (Hanafie, 2017). Masalah yang diangkat dalam artikel ini yaitu dimana akses kemiskinan perempuan memberikan efek domino terhadap penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini untuk mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi karena adanya indikator yang terukur; memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi baik di pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan strategi PUG. Penelitian ini menggunakan metode analisa kebijakan Pengarusutamaan Gender untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program pembangunan. Hasil penelitian ini diimplementasikan pada seluruh tahap pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan melalui: 1) Penguatan prasyarat yang terdiri dari 7 aspek yaitu dukungan politik, kebijakan,

kelembagaan, sumber daya, sistem data dan informasi, alat analisis serta dukungan masyarakat sipil; 2) Sektor/lembaga menyusun RKA/KL di mana menggunakan data terpilah, melalui proses musrenbang, dan melewati tahapan analisis gender; 3) Bappeda kabupaten Mojokerto menyusun tolok ukur dan indikator kinerja; 4) Adanya komitmen dalam penerapan anggaran berimbang.

5. Penelitian berjudul “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender: Studi Kasus di DP3AP2KB Jawa Tengah” ditulis oleh Ristya Dewi Anggreini dan Rina Ghulam Martini, yang diterbitkan pada tahun 2025 dalam *Journal of Politic and Government Studies* (Anggreini & Martini, 2025). Masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah meskipun sudah ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, implementasinya di lapangan khususnya oleh DP3AP2KB Jawa Tengah belum berjalan optimal yaitu belum optimalnya implementasi kebijakan PUG, Koordinasi lintas sektor yang lemah, keterbatasan anggaran responsif gender, pemahaman stakeholder yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, data gender yang belum memadai, monitoring dan evaluasi yang belum efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tujuh indikator prasyarat pengarusutamaan gender untuk menganalisis pelaksanaan pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah mengenai Pengarusutamaan Gender menghadapi beberapa tantangan, termasuk koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan anggaran responsif gender, dan pemahaman stakeholder yang beragam tentang konsep PUG.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya menganalisis implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), tetapi juga mengkaji secara mendalam strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan PUG melalui aspek kelembagaan, pelibatan, kapasitas, program, dan sosialisasi. Selain itu, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan masyarakat pesisir yang berbeda dengan daerah penelitian sebelumnya.

1.7 Landasan Teori/ Konseptual

1.7.1 Teori *Gender Mainstreaming*/Pengarusutamaan gender (PUG)

Menurut Caroline (Moser,1993) pembangunan yang responsif gender harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan perempuan serta laki-laki secara seimbang melalui proses perencanaan pembangunan yang sensitif gender. Pemikiran tersebut kemudian menjadi salah satu landasan berkembangnya strategi Gender Mainstreaming yang secara resmi diperkenalkan dalam Konferensi Perempuan Dunia di Beijing tahun 1995 dan diperkuat melalui pedoman ECOSOC tahun 1997 mengenai pengintegrasian perspektif gender ke dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan. (Moser, 1993)

Pada tahun 1997, ECOSOC (*Economic and Social Council*) mengeluarkan pedoman resmi tentang Gender Mainstreaming, yang mendefinisikan strategi PBB untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh kebijakan dan program PBB. Berdasarkan dokumen resmi ECOSOC, dijelaskan bahwa:

“Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic, and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality”

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) merupakan suatu strategi integral dalam pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi maupun budaya.

Pendekatan ini tidak hanya menekan pada kepentingan partisipasi perempuan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan mempertimbangkan secara serius kebutuhan, peran, dan pengalaman perempuan dan laki-laki secara adil dan setara. Dalam konteks ini, gender mainstreaming mengharuskan seluruh pemangku kebijakan, termasuk pemerintah daerah untuk menjadikan perspektif gender sebagai bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program kerja mereka.

Untuk mengetahui PUG telah diimplementasikan, terdapat beberapa indikator utama yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Kelembagaan (*Institutionalization*)

Pengarusutamaan Gender (PUG) tidak dapat berjalan secara efektif tanpa adanya dukungan struktur dan sistem yang memadai di dalam organisasi maupun pemerintahan. Salah satu prasyarat utama yang menentukan keberhasilan implementasi PUG adalah aspek kelembagaan (*institutionalization*), yaitu sejauh mana suatu organisasi memiliki struktur, mekanisme, dan komitmen yang mendukung pengintegrasian perspektif gender ke dalam seluruh siklus kebijakan dan program.

"A strategy for making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes." (UN ECOSOC, 1997)

Indikator kelembagaan merujuk pada sejauh mana struktur organisasi dan perangkat kelembagaan telah mendukung pelaksanaan PUG. Hal ini mencakup keberadaan unit atau *focal point* gender, regulasi internal, serta komitmen pimpinan dalam mendorong integrasi gender dalam kebijakan.

2. Pelibatan (*Participation*)

Keberhasilan PUG juga sangat ditentukan oleh sejauh mana perempuan dan laki-laki dilibatkan secara nyata dalam setiap tahapan pembangunan. Aspek ini dikenal sebagai pelibatan (*participation*), yaitu

indikator yang menilai keterlibatan aktif kedua kelompok gender mulai dari tanpa perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dan program. Berikut definisi pelibatan dalam konteks PUG:

"Women must be involved in the planning process if their needs are to be identified and addressed."(Moser,1993)

Pelibatan merujuk pada sejauh mana perempuan dan laki-laki dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Indikator ini menekankan pentingnya keterlibatan yang setara, bukan hanya dari segi jumlah, tetapi juga dari kualitas partisipasi.

3. Kapasitas (*Capacity Building*)

Faktor lain yang sangat menentukan keberhasilan PUG adalah Kapasitas (*capacity building*) sumber daya manusia yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Aspek ini menyoroti pentingnya kemampuan teknis aparatur maupun masyarakat dalam mengenali isu-isu gender serta mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pembangunan. Berikut definisi kapasitas dalam konteks PUG:

"Gender planning requires trained personnel capable of identifying gender issues and incorporating them into development planning."(Moser, 1993)

Kapasitas berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat, dalam memahami dan mengimplementasikan perspektif gender. Hal ini meliputi pelatihan, peningkatan pemahaman, serta penguatan keterampilan dalam analisis gender.

4. (*Programs*)

Suatu program pembangunan dapat dikategorikan responsif gender apabila perancangannya telah mempertimbangkan secara eksplisit kebutuhan, pengalaman, serta kondisi spesifik yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Hal tersebut sejalan dengan definisi *gender mainstreaming* yang menjadi acuan dalam indikator ini:

"Gender mainstreaming is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes."(ECOSOC,1997)

Indikator program melihat bagaimana kebijakan dan program pembangunan telah responsif gender. Program yang responsif gender adalah program yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kondisi spesifik perempuan dan laki-laki.

5. Sosialisasi (*Dissemination*)

Sosialisasi yang berperan penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai kesetaraan gender tidak hanya dipahami oleh aparat pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Pencapaian kesetaraan gender pada dasarnya membutuhkan perubahan pola pikir, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dan laki-laki, sehingga upaya penyebarluasan informasi menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan PUG. Berikut definisi yang menjadi acuan untuk indikator sosialisasi.

"The achievement of gender equality requires changes in attitudes, values and perceptions regarding the roles of women and men."

Sosialisasi berkaitan dengan upaya penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender dan PUG. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, seminar, kampanye, maupun penyuluhan kepada masyarakat.

Teori Pengarusutamaan Gender (PUG) sangat relevan dengan penelitian ini karena fokus penelitian terletak pada keterlibatan perempuan dan laki-laki dan pengambilan keputusan pembangunan. PUG memberikan kerangka untuk menilai sejauh mana perspektif gender telah diintegrasikan dalam proses tersebut. Melalui indikator kelembagaan, penelitian ini dapat melihat apakah terdapat dukungan struktur dan kebijakan yang mendorong keterlibatan perempuan. Indikator pelibatan digunakan untuk menganalisis tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Sementara itu, indikator kapasitas membantu memahami apakah aktor-aktor yang terlibat memiliki pemahaman

yang cukup mengenai gender. Indikator program memungkinkan analisis terhadap apakah kebijakan yang dihasilkan telah responsif gender, sedangkan indikator sosialisasi digunakan untuk melihat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender.

1.7.2 Teori Partisipasi Masyarakat

Arnstein (1969) dalam artikelnya yang berjudul *A Ladder of Citizen Participation* menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Arnstein menyatakan bahwa:

"Citizen participation is a categorical term for citizen power. It is the redistribution of power that enables the have-not citizens, presently excluded from the political and economic processes, to be deliberately included in the future"(Arnstein, 1969, p. 216).

Berdasarkan pernyataan tersebut, partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran atau keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, partisipasi dipandang sebagai bentuk redistribusi kekuasaan yang memungkinkan kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan untuk turut menentukan arah pembangunan.

Dalam konsep *Ladder of Citizen Participation*, Arnstein (1969) mengelompokkan delapan tingkatan partisipasi ke dalam tiga kategori utama, yaitu *Non-Participation*, *Degrees of Tokenism*, dan *Degrees of Citizen Power*. Penelitian ini menggunakan kategori *Degrees of Tokenism* karena dinilai paling relevan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam mendukung Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Arnstein menjelaskan bahwa:

"Tokenism allows the have-nots to hear and to have a voice. Under these conditions they lack the power to insure that their views will be heeded by the powerful" (Arnstein, 1969, p. 217).

Berdasarkan pernyataan tersebut, tokenisme merupakan kondisi ketika masyarakat telah diberikan ruang untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam proses pembangunan, namun belum memiliki kekuasaan yang cukup untuk memastikan bahwa aspirasi mereka benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, masyarakat telah dilibatkan secara formal, tetapi pengambilan keputusan tetap didominasi oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Ketiga tingkatan tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana masyarakat, khususnya perempuan, dilibatkan dalam proses pembangunan daerah dalam mendukung terwujudnya Pengarusutamaan Gender.

1. *Informing* (Pemberian Informasi)

Tingkatan ini menempatkan pemerintah atau penyelenggara pembangunan sebagai pihak yang menyampaikan informasi mengenai program, kebijakan, atau kegiatan kepada masyarakat, sebagai langkah awal sebelum masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih bermakna dalam proses pembangunan. Berikut definisi yang menjadi acuan untuk tingkatan informing:

"Informing citizens of their rights, responsibilities, and options can be the most important first step toward legitimate citizen participation." (Arnstein, 1969, p. 219)

Informing merupakan tingkat partisipasi di mana pemerintah atau pihak penyelenggara pembangunan memberikan informasi kepada masyarakat terkait program, kebijakan, atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini, komunikasi yang terjadi bersifat satu arah, yaitu dari pemerintah kepada masyarakat tanpa adanya ruang umpan balik.

2. *Consultation* (Konsultasi)

Konsultasi menempatkan masyarakat pada posisi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan informing, karena mereka mulai diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi melalui forum diskusi, musyawarah,

survei, maupun wawancara. Berikut definisi yang menjadi acuan untuk tingkatan *consultation*:

"Inviting citizens' opinions, like informing them, can be a legitimate step toward their full participation. But if consultation is not combined with other modes of participation, this level of citizen participation is still a sham since it offers no assurance that citizen concerns and ideas will be taken into account." (Arnstein, 1969, p. 219)

Consultation merupakan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan *informing*, di mana masyarakat mulai diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, atau masukan terhadap suatu program atau kebijakan. Bentuknya bisa berupa forum diskusi musyawarah, survei, atau wawancara.

3. *Placation* (Penenteraman/Akomodasi Terbatas)

Placation menunjukkan adanya kemajuan dibandingkan *consultation* karena masyarakat, termasuk kelompok perempuan, mulai dilibatkan secara formal dalam proses pengambilan keputusan. Berikut definisi yang menjadi acuan untuk tingkatan *placation*

"Placation is simply a higher level tokenism because the ground rules allow have-nots to advise, but retain for the powerholders the continued right to decide." (Arnstein, 1969, p. 220)

Placation merupakan tingkat partisipasi dimana masyarakat, termasuk kelompok perempuan, mulai dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, misalnya dengan menjadi perwakilan dalam forum atau kepanitiaan.

Teori partisipasi dari Arnstein sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan tingkat dan kualitas keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Melalui Indikator *informing*, penelitian ini dapat melihat sejauh mana perempuan mendapatkan akses informasi terkait pembangunan. Indikator *Consultation* membantu menganalisis apakah

perempuan telah diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Sementara itu, indikator Placation digunakan untuk menilai apakah perempuan telah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, meskipun mungkin masih dalam batas tertentu.

Dengan menggunakan teori Arnstein, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi ada atau tidaknya partisipasi, tetapi juga mampu mengukur sejauh mana partisipasi tersebut bersifat bermakna atau hanya sebatas formalitas. Pada tahap *informing*, masyarakat hanya menerima informasi tanpa adanya ruang untuk memberikan tanggapan. Pada tahap *consultation*, masyarakat mulai diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, misalnya melalui forum diskusi atau survei, namun tidak ada jaminan bahwa pendapat tersebut akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, pada tahap *placation*, masyarakat diberikan sedikit ruang untuk berpartisipasi, seperti melalui keterwakilan dan suatu forum, tetapi kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah. pengambilan keputusan, termasuk, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

1.7.3 Teori Gender and Development (GAD)

Teori *Gender and development* (GAD) merupakan pendekatan dalam studi pembangunan yang menekankan pentingnya memahami relasi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan. Pendekatan ini dikembangkan oleh Caroline Moser melalui karyanya *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. Yang diterbitkan pada tahun 1993. Caroline Moser mengatakan (Moser, 1993)

“Gender planning is a new tradition whose goal is to ensure that women, through empowering themselves, achieve equality and equity with men in developing societies. Gender Planning and Development focuses on the interrelationship between gender and development, the formulation of gender policy and the implementation of gender planning practice. Its importance relates to the fact that current development policy, because of incorrect assumptions, often, if inadvertently, discriminates against or “misses” women, while even correctly formulated policy too often fails to get translated into practice”

Dalam pandangan Moser, pembangunan tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan, karena relasi tersebut menentukan akses terhadap sumber daya, partisipasi, serta kontrol dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, GAD hadir sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender melalui pemberdayaan perempuan. (Moser, 1993)

Untuk menganalisis kesetaraan gender secara lebih komprehensif, pendekatan GAD menggunakan beberapa indikator utama yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Keempat indikator ini saling berkaitan dan digunakan untuk melihat apakah pembangunan telah berjala secara adil bagi laki-laki dan perempuan.

1. Akses (*Access*)

Berkaitan dengan indikator tersebut, para ahli memberikan definisi menjadi dasar dalam memahami konsep yang dimaksud. Oleh karena itu, berdasarkan temuan Moser Caroline O.N(1993) sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training* mengenai indikator Akses sebagai:

"Women often have less access than men to resources such as land, credit, education, training and employment."(Moser, 1993)

Akses merujuk pada kesempatan dan peluang yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki untuk memperoleh berbagai sumber daya pembangunan. Sumber daya tersebut meliputi pendidikan, informasi, pelatihan, pekerjaan, modal ekonomi, serta akses terhadap forum-forum pengambilan keputusan seperti musyawarah perencanaan pembangunan.

2. Partisipasi (*Participation*)

Berkaitan dengan indikator tersebut, para ahli memberikan definisi menjadi dasar dalam memahami konsep yang dimaksud. Oleh karena itu, berdasarkan temuan Moser Caroline O.N(1993) sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training* mengenai indikator Partisipasi sebagai:

"Women must be involved in the planning process if their needs are to be identified and addressed."(Moser, 1993)

Partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif perempuan dan laki-laki dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi yang dimaksud tidak hanya bersifat kehadiran secara fisik, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam menyampaikan pendapat, memberikan usulan, serta terlibat dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan.

3. Kontrol (*Control*)

Berkaitan dengan indikator tersebut, para ahli memberikan definisi menjadi dasar dalam memahami konsep yang dimaksud. Oleh karena itu, berdasarkan temuan Moser Caroline O.N(1993) sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training* mengenai indikator Akses sebagai:

"The issue is not only access to resources, but also control over resources and decision-making."(Moser, 1993)

Kontrol merupakan indikator yang paling penting dalam analisis gender, karena berkaitan langsung dengan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Kontrol merujuk pada kemampuan perempuan dan laki-laki untuk menentukan pilihan, mempengaruhi keputusan, serta memiliki otoritas terhadap penggunaan sumber daya dan arah kebijakan pembangunan.

4. Manfaat (*Benefit*)

Berkaitan dengan indikator tersebut, para ahli memberikan definisi menjadi dasar dalam memahami konsep yang dimaksud. Oleh karena itu, berdasarkan temuan Moser Caroline O.N(1993) sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training* mengenai indikator Akses sebagai:

"Development planning should ensure that women as well as men benefit from development interventions."(Moser, 1993)

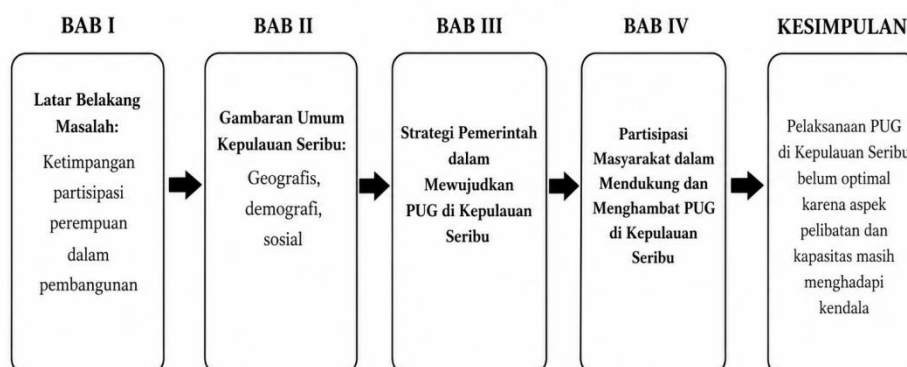
Manfaat merujuk pada hasil atau dampak dari pembangunan yang dirasakan oleh perempuan dan laki-laki. Pembangunan yang responsif gender seharusnya mampu memberikan manfaat yang adil dan merata bagi kedua kelompok. .

Pendekatan GAD sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu memberikan kerangka analisis yang menyeluruh dalam melihat keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan pembangunan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada jumlah keterlibatan perempuan, tetapi juga pada kualitas keterlibatan tersebut.

Melalui indikator akses, penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pembangunan. Indikator partisipasi digunakan untuk melihat sejauh mana perempuan benar-benar berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan. sementara itu, indikator kontrol menjadi penting untuk menganalisis apakah perempuan memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan. Terakhir, indikator manfaat digunakan untuk menilai apakah hasil pembangunan telah dirasakan secara adil oleh perempuan dan laki-laki.

1.8 Alur Pemikiran

Bagan 1.8 Alur Pemikiran



Sumber: Hasil olahan Peneliti, tahun 2026

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam kondisi alamiah untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2023), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan mengutamakan kedalaman data, bukan kuantitas nya. Oleh karena itu, metode ini dianggap tepat dalam memahami bagaimana kebijakan PUG dirumuskan dan dilaksanakan, serta bagaimana realita partisipasi laki-laki dan perempuan di lapangan.

1.9.2 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan strategi menyeluruh yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai komponen penelitian secara logis dan koheren. Menurut Creswell, studi kasus (*case study research*) adalah pendekatan penelitian kualitatif dimana peneliti mengeksplorasi secara mendalam suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau individu dalam konteks nyata (*real life context*). Studi kasus melibatkan sumber informasi, seperti wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi (Cresswell, 1998). Peneliti studi kasus ini bersifat intrinsik, karena adanya fokus utamanya adalah untuk memahami secara spesifik dan mendalam tentang bagaimana pemerintah mewujudkan PUG dengan melibatkan laki-laki dan perempuan secara setara dalam proses pembangunan.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh peneliti (Cresswell, 2014), yang meliputi wawancara, dokumentasi, serta penggunaan data audio-visual. Peneliti mengandalkan berbagai sumber data guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang PUG di Kep Seribu. Teknik ini dilakukan secara berkelanjutan dan bersifat interaktif, dimana proses pengumpulan data tidak terlepas dari kegiatan analisis data itu sendiri.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri atas:

- 1) Data primer, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci yang terkait langsung dengan PUG
- 2) Data sekunder, yang diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang undangan, laporan tahunan, artikel ilmiah, serta sumber tertulis lainnya yang relevan.

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam, penulis akan menjelaskan lebih jauh mengenai tiga teknik utama pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut:

1.9.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang efektif untuk memperoleh informasi langsung dari informan terkait isu atau permasalahan yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian mengenai Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan PUG di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan terkait PUG tersebut. Kegiatan wawancara melibatkan pertemuan langsung antara peneliti dan informan untuk bertukar informasi, saran, dan ide melalui interaksi tanya jawab, sehingga peneliti dapat mengonstruksi makna dari hasil percakapan yang terjadi (Idrus, 2009).

1.9.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini diliputi oleh berbagai bentuk catatan tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang digunakan dapat meliputi dokumen kebijakan, laporan kegiatan, data partisipasi masyarakat, serta arsip resmi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pengarusutamaan gender. Melalui dokumentasi tersebut, peneliti menganalisis bagaimana akses, partisipasi, dan peran perempuan serta laki-laki tercermin dalam data formal, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.

1.9.4 Sampel atau Informan

Penelitian informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari unsur pemerintah daerah, pelaksana program, serta masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dari unsur pemerintah daerah, informan meliputi perwakilan Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) yang berperan dalam pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender (PUG), serta perwakilan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) yang berperan dalam perencanaan dan integrasi kebijakan pembangunan berbasis gender. Selain itu, informan juga mencakup camat sebagai pengambil kebijakan di tingkat wilayah.

Dari unsur masyarakat, informan terdiri dari kader PKK atau pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PEK) sebagai aktor lapangan yang berperan dalam pemberdayaan perempuan, perempuan yang aktif dalam kegiatan pembangunan sebagai representasi partisipasi perempuan, laki-laki yang terlibat dalam kegiatan pembangunan sebagai representasi partisipasi perempuan, laki-laki yang terlibat dalam kegiatan pembangunan sebagai pembanding partisipasi gender, serta tokoh masyarakat yang memahami kondisi sosial dan budaya setempat. Pemilihan informan ini juga mempertimbangkan keterwakilan wilayah, mengingat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan data yang mendalam terkait relasi gender (GAD, tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan, serta strategi perempuan daerah dalam mewujudkan PUG guna mewujudkan kesetaraan gender.

Table 1.9.4 Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan	Jabatan	alasan
1	Novi Rahmawati	Perwakilan sudin PPAPP yang memahami dan menangani program PUG secara langsung	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SUDIN PPAPP	Dipilih karena memiliki kewenangan dan pengetahuan terkait perumusan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)
2	Heru Topani	Perwakilan SUBANPEDA	Perencana Ahli Pertama	Menyusun Perencanaan Program terkait gender dan yang melakukan monitoring terhadap hasil program
3 4	Bpk. Ari Priyanto Bpk. Muhammad Ardiansyah	Yang memiliki peran sebagai pengambilan kebijakan di tingkat kelurahan	1. Sekel Kelurahan Pulau Tidung Kecamatan Pulau Seribu Selatan 2. Lurah Kelurahan Pulau Kelapa	Memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan serta memastikan keterlibatan masyarakat
5	Ibu Akriyah	Yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kader Dasawisma	Memiliki peran penting dalam menjembatani program pemerintah

		khususnya perempuan		dengan partisipasi perempuan
6	1. BPK Ale masyarakat kepulauan seribu Selatan 2. Abdul Masyarakat Kepulauan Seribu Utara	Laki-laki yang aktif dalam kegiatan pembangunan	Masyarakat	sebagai pembanding untuk melihat perbedaan tingkat partisipasi antara laki-laki dan perempuan
7				
8	1. Sri Rahyuni	Perempuan yang aktif dalam kegiatan Pembangunan (misalnya musrenbang atau kegiatan sosial)	Masyarakat	Representasi perempuan dalam pembangunan untuk melihat keterlibatan mereka
9	1. Rahmat	Masyarakat yang memahami kondisi sosial dan budaya setempat	Masyarakat	Memiliki pengetahuan mengenai norma, nilai, dan relasi gender yang memengaruhi masyarakat

Sumber:Olahan Penulis,2026

1.9.5 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2015), instrumen penelitian kualitatif dapat berupa panduan wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan lembar observasi tergantung pada metode pengumpulan data yang digunakan. Instrumen penelitian dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara terstruktur yang disusun berdasarkan kerangka teori *Gender Mainstreaming (PUG)* dan teori partisipasi masyarakat oleh Sherry R. Arnstein. Instrumen ini digunakan untuk mengetahui informasi secara mendalam terkait strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta mengetahui informasi mendalam bagaimana partisipasi perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Pertanyaan wawancara disusun dengan mengacu pada beberapa aspek utama yang berasal dari indikator Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu:

1. Kelembagaan, yang meliputi keberadaan kebijakan koordinasi antar instansi, serta komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan PUG.
2. Pelibatan Masyarakat, yang meliputi keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan yang responsif gender.
3. Kapasitas, yang meliputi kemampuan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam memahami serta menerapkan perspektif gender melalui pelatihan, Pendidikan dan peningkatan kompetensi.
4. Sosialisasi, yang meliputi Upaya penyebaran informasi, edukasi, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Pengarusutamaan Gender.

Selain itu, pertanyaan wawancara juga disusun berdasarkan teori Tangga Partisipasi Arnstein yang difokuskan pada tiga tingkatan partisipasi masyarakat yaitu:

1. Informing, yaitu pemberian informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender.
2. Consultation, yaitu proses konsultasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, masukan maupun aspirasi terkait pelaksanaan program.

3. Placation, yaitu tingkat partisipasi yang menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, meskipun kewenangan utama masih berdada pada pemerintah.

Instrumen ini di tujukan kepada beberapa informan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaksana program yang mendukung PUG, masyarakat Kepulauan Seribu, sehingga data yang di dapat bersifat komprehensif dan mampu menggambarkan kondisi nyata secara menyeluruh. Rincian instrumen penelitian dijabarkan dalam tabel berikut:



Tabel 1.9.5 Instrumen Penelitian

Konsep	Dimensi	Indikator	pertanyaan	Narasumber
Gender Mainstreaming Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) (Moser, 1993)	Kelembagaan	Struktur, aturan, dan mekanisme organisasi pendukung PUG	a. Bagaimana struktur organisasi yang ada mendukung penerapan PUG di Pulau seribu? b. Bagaimana regulasi internal dalam mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu saat ini? c. Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan kesetaraan gender? d. Bagaimana Komitmen Pemerintah Daerah memastikan integrasi gender dalam setiap pengambilan keputusan di Kabupaten Administrasi	-PPAPP -Subanpeda -Kelurahan

			Kepulauan Seribu ?	
	Pelibatan	Partisipasi setara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan	a. Bagaimana pemerintah daerah melibatkan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dalam proses pembangunan daerah? b. Dalam forum perencanaan atau musyawarah pembangunan, apakah semua kelompok masyarakat telah diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat? c. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelibatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu?	-Sudin PPAPP -Subanpeda -Kelurahan

	Kapasitas	Kemampuan SDM dan organisasi menerapkan PUG	a) Bagaimana Kapasitas SDM pelaksana dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu? b) Bagaimana memastikan bahwa kapasitas SDM pelaksana mumpuni dalam menjalankan tugasnya? c) Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan?	-Sudin PPAPP -Subanpeda -Kelurahan
	Program	Integrasi gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program	a. Program apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan PUG di Kepulauan Seribu? b. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa program pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh laki-laki	-Sudin PPAPP -Subanpeda -Kelurahan

			dan perempuan? c. Bagaimana pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan program mempertimbangkan kebutuhan masyarakat baik laki-laki dan perempuan secara setara?	
	Sosialisasi	Penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran tentang gender	a) Bagaimana bentuk sosialisasi atau penyebaran informasi terkait PUG kepada masyarakat? b) Sarana/media apa saja yang digunakan pemerintah dalam sosialisasi PUG di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu? c) Kendala apa yang dihadapi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai PUG	-Sudin PPAPP -Subanpeda -Kelurahan

Teori Partisipasi Masyarakat (Arnstein 1969)	Informing	informasi yang cukup mengenai program pembangunan dan PUG.	a. Bagaimana Pemerintah memastikan bahwa informasi mengenai program pembangunan dan kesetaraan gender diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh? b. Bagaimana memastikan bahwa informasi yang diberikan pemerintah dipahami mudah dipahami masyarakat? c. Bagaimana respon masyarakat terkait informasi pembangunan yang disampaikan oleh pemerintah ?	-Masyarakat -Kader Dasawisma -Tokoh laki-laki -Tokoh Perempuan
	Consultation	kesempatan menyampaikan kebutuhan dan pendapat.	a) Bagaimana masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan/pendapat untuk proses pembangunan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu? b) Dalam forum musyawarah atau	-Masyarakat -Kader Dasawisma -Tokoh Perempuan Tokoh Laki-laki

			rapat lingkungan, apakah semua masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat? c) Bagaimana masukan masyarakat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pembangunan ?	-Tokoh Perempuan
	Placation	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pertimbangan keputusan	a. Apakah masyarakat pernah dilibatkan secara langsung dalam kegiatan atau forum pembangunan di lingkungan sekitar? b. Bagaimana memastikan bahwa keterlibatan masyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan yang diambil? c. Apa saja hambatan yang ditemui dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam	-Masyarakat -Kader -Dasawisma -Tokoh laki-laki -Tokoh Perempuan

			pembangunan	
--	--	--	-------------	--

Sumber: Olahan Peneliti , 2026



1.9.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1994), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi tiga halaman utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles,1994). Proses analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian Strategi Pemerintah dalam Mewujudkan PUG di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, data dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti wawancara dan dokumentasi.

1.9.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengumpulan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan di yang ditemui di lapangan. Pada bagian ini peneliti memilih data yang paling relevan dengan fokus penelitian, yaitu strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengarusutamaan gender (PUG) serta bagaimana partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan pembangunan.

1.9.6.2 Penyajian data

Penyajian data ini dilakukan dengan menyusun informasi yang telah di reduksi ke dalam bentuk yang sistematis seperti pada narasi deskriptif dan tabel yang tercantum. Penyajian bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data. Data dalam penelitian ini di sajikan dengan menyusun hasil wawancara berdasarkan kelompok informan yaitu pemerintah, pelaksana, dan masyarakat dan mengelompokkan data sesuai indikator dalam Teori *Gender and Developtment* dari Caroline Moser (akses, partisipasi, kontrol, manfaat), serta menganalisis tingkat partisipasi berdasarkan tangga partisipasi dari Teori Arnstein.

1.9.6.3 Penarikan Kesimpulan

Setelah data dicantumkan, peneliti menarik kesimpulan sementara yang dilakukan secara bertahap berdasarkan temuan data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dengan membandingkan data antar informan, menguji konsistensi data dengan teori yang digunakan yaitu PUG dan Partisipasi dari Arnstein serta melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh di lapangan.

1.10 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terfokus dan terarah pada fenomena yang diteliti, diperlukan perumusan pokok inti dari setiap bab. Oleh karena itu, penulis menyusun sistematika penulisan secara terstruktur untuk memastikan setiap bagian mencakup aspek-aspek penting yang mendukung pembahasan utama sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena ketimpangan partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Bab ini juga memuat rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, landasan teoritik dan konseptual, bagian alur berpikir, atau penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KEPULAUAN SERIBU

Bab ini menguraikan secara deskriptif mengenai objek penelitian, yaitu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pembahasan meliputi kondisi geografis, demografis, sosial, serta karakteristik masyarakat pesisir yang memengaruhi relasi gender. Selain itu, bab ini juga menjelaskan gambaran umum kebijakan dan penerapan PUG di wilayah tersebut, termasuk program pemerintah daerah yaitu Suku Dinas PPAPP Kepulauan Seribu dan kondisi partisipasi perempuan dalam pembangunan.

BAB III : STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Bab ini berisi analisis mengenai strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Analisis dilakukan berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dikaitkan dengan teori Pengarusutamaan Gender (PUG) serta teori partisipasi masyarakat. Pada bab ini dibahas bagaimana pemerintah daerah melalui Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjalankan strategi PUG dalam proses pembangunan daerah. Analisis dilakukan untuk melihat bagaimana pemerintah mengintegrasikan

perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara.

BAB IV : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PUG DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Bab ini berisi analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pada bab ini dibahas bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung program dan kebijakan PUG yang dijalankan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, sosialisasi, serta partisipasi dalam proses pembangunan maupun laki-laki, ikut berperan dalam mendukung terciptanya kesetaraan gender di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan juga menekankan temuan utama penelitian, termasuk bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan serta efektivitas strategi pemerintah dalam mewujudkan PUG. Bagian ini memuat kebaruan (*novelty*) penelitian, yaitu temuan mengenai kesenjangan antara partisipasi formal dan partisipasi substantif perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan di wilayah Kepulauan Seribu.